

**ANALISIS SINKRONISASI DAN HARMONISASI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
PENCURIAN IKAN (*ILLEGAL FISHING*) SEBAGAI UPAYA
PENYELAMATAN SUMBERDAYA ALAM PERIKANAN DAN
KELAUTAN INDONESIA**

TESIS

Oleh
Mia Arti Melani, S.Pi
201620252012



**PROGRAM STUDY MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
BEKASI
2019**

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Jini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung

Judul Tesis : Analisis Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) sebagai Upaya Peyelamatan Sumbidaya Alam Perikanan dan Kelautan Indonesia

Judul Proposal/Tesis : Analisis Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) sebagai Upaya Peyelamatan Sumbidaya Alam Perikanan dan Kelautan Indonesia

Nama Mahasiswa : Mia Arti Melani, S.Pi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620252012

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana



Bekasi, 2 Februari 2019

MENYETUJUI:

Pembimbing I

Pembimbing II

[Handwritten signatures of Dr. H. Erwin Owan Hermansyah and Dr. Ir.H.M.Hanafi Darwis]

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah,SH., MH
NIDN:0319046403

Dr. Ir.H.M.Hanafi Darwis,SH., MM
NIDN :323015604

LEMBAR PENGESAHAN

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung

Judul Tesis : Analisis Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) sebagai Upaya Peyelamatan Sumberdaya Alam Perikanan dan Kelautan Indonesia

Nama Mahasiswa : Mia Arti Melani, S.Pi

Nomor Pokok Mahasiswa : 201620252012

Program Studi / Fakultas : Magister Ilmu Hukum

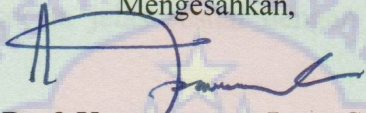
Konsentrasi : Hukum Pidana

Tanggal Lulus Ujian Tesis :

Bekasi, 14 Februari 2019

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji


Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM

NIDN : 032034001

Penguji I


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH

NIDN: 0319046403

Penguji II

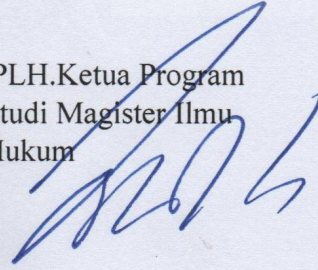

Dr. Noviriska, SH., MH

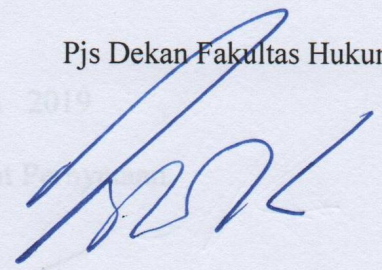
NIDN: 0323035802

MENGETAHUI,

PLH. Ketua Program
Studi Magister Ilmu
Hukum

Pjs Dekan Fakultas Hukum


Bhatara Ibnu Reza, SH., M.Si., M.Ph.D.
NIP: 1809353


Bhatara Ibnu Reza, SH., M.Si., M.Ph.D.
NIP: 1809353

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Tesis yang berjudul:

Analisis Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) sebagai Upaya Peyelamatan Sumberdaya Alam Perikanan dan Kelautan Indonesia.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 2 Februari 2019

Yang Membuat Pernyataan,



Mia Arti Melani, S.Pi
NPM. 201620252012

ABSTRAK

Mia Arti Melani .201620252012. Analisis Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) sebagai Upaya Peyelamatan Sumberdaya Alam Perikanan dan Kelautan Indonesia

Tujuan dari penelitian ini adalah terciptanya sinkronisasi dan harmonisasi diantara peraturan perundang – undangan, sehingga dalam pengelolaan sumberdaya alam kelautan, penanganan permasalahan laut dan perikanan Indonesia khususnya *Illegal Fishing* tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam upaya penegakan hukum, memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi semua masyarakat. Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, metode pendekatan yang bersifat penelitian deskriptif (memaparkan). Hal ini dikarenakan masalah yang dibahas berkaitan dengan memaparkan hubungan antara peraturan perundang-undangan yang ada terhadap efektifitas penanganan masalah *Illegal Fishing*. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan utuh mengenai latar belakang yang menjadi masalah terjadinya ketidaksinkronan dan ketidakharmonisnya peraturan yang terkait *Illegal Fishing*.

Kesimpulan: diperlukannya suatu keharmonisan dan keserasian untuk menjadikan arah dan tujuan yang sama antar peraturan perundang-undangan itu sendiri. Upaya harmonisasi dilakukan terhadap rancangan undang-undang di tingkat mana pun, sejak dari tahap perencanaan hingga pada tahap pembahasan. Sedangkan upaya sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah ada baik secara vertikal maupun horizontal. Upaya harmonisasi dan sinkronisasi hukum bertujuan agar terwujud kesederhanaan/ kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Penerapkan peraturan yang lebih tegas dan keberpihakan kepada kepentingan bangsa dan negara, menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya, sejak penataan sistem perizinan, pengawasan di lapangan, hingga peradilan pasti akan mengurangi paraktek *Illegal Fishing*. Penanganan masalah pengawasan laut khususnya kejahatan perikanan mestinya tidak parsial dan harus komprehensif sehingga efektif dan tidak menyisakan persoalan baru. Kata kunci: Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan, *illegal Fishing*, Sumberdaya Alam Perikanan, Kelautan Indonesia

ABSTRACT

Mia Arti Melani .201620252012. Synchronization and Harmonization Analysis of Legislative Regulations related to Fish Theft (Illegal Fishing) as a Peyeel Salvation of Natural and Fisheries Resources in Indonesia

The purpose of this study is the creation of synchronization and harmonization among laws and regulations, so that in the management of marine natural resources, the handling of Indonesian sea and fisheries issues, especially Illegal Fishing, there is no overlapping authority in law enforcement efforts, providing legal certainty and benefits for all communities. The type of research conducted by researchers is a type of normative legal research with the approach used in this study, a method that is descriptive research (describing). This is because the problems discussed are related to describing the relationship between existing laws and regulations on the effectiveness of handling Illegal Fishing problems.

With this approach, it is hoped that a clear and intact picture of the background can be obtained which is a problem in the occurrence of irregularities and disharmony in the regulations related to Illegal Fishing. Conclusion: the need for harmony and harmony is needed to make the same direction and purpose between the laws and regulations themselves. Harmonization efforts have been made towards the draft law at any level, from the planning stage to the discussion stage. While efforts to synchronize existing laws and regulations both vertically and horizontally. Efforts to synchronize and synchronize laws aim to realize the simplicity / usefulness of law, legal certainty and justice. Implementing stricter regulations and alignments with the interests of the nation and state, implementing the law as well as possible, since the arrangement of the licensing system, supervision in the field, and the judiciary will definitely reduce Illegal Fishing practices. Handling the problem of marine supervision, especially fisheries crime, should not be partial and must be comprehensive so that it is effective and leaves no new problems. Keywords: Synchronization and harmonization of regulations, illegal fishing, fisheries natural resources, marine Indonesia



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Proposal Tesis ini dengan judul Analisis Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Pencurian Ikan (*Illegal Fishing*) sebagai Upaya Peyelamatan Sumberdaya Alam Perikanan dan Kelautan Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan, oleh karenanya kritik atau saran yang membangun selalu penulis harapkan. Kiranya keberhasilan ini tidak terlepas dari do'a dan bantuan dari banyak pihak. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak **Dr. Dwi Atmoko, SH., MH**, dan Bapak **Bhatara Ibnu Reza, SH., M.Si., M.Ph.D**, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak **Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH** dan Bapak **Dr. Ir. H. M. Hanafi Darwis, SH., MM**, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahannya kepada saya dengan penuh kesabaran selama penulisan proposal tesis ini.
3. Bapak **Prof. Koesparmono Irsan, S.IK., SH., MBA., MM** . Bapak **Dr. Hotma P.Sibuea, SH., MH**, dan Ibu **Dr. Noviriska, SH, MH** selaku dosen penguji yang telah memberikan masukan dan arahannya kepada saya guna perbaikan proposal tesis ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Bekasi, 25 Januari 2018

Penulis

Mia Arti Melani, S.Pi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTACK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Batasan masalah.....	6
1.3 Identifikasi Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1.6 Kerangka Konsepsional	9
1.7 Kerangka Teoritis	14
1.8 Kerangka Pemikiran.....	18
1.9 Metode Penelitian.....	19
1.10 Sistematika Penulisan.....	20

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 21

BAB III HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERATURAN

PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT *ILLEGAL FISHING* DI INDONESIA

1.1 Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia.....	48
1.2 Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan terkait <i>Illegal Fishing</i> di Indonesia.....	58

BAB IV PENEGAKAN HUKUM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA TERKAIT PENANGANAN PERMASALAHAN TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING*

4.1 Kompleksitas permasalahan <i>Illegal Fishing</i> dan Perpres No.115 Tahun 2015.....	68
4.2.Tidak Adanya Kepastian Hukum Terhadap Kasus Perikanan.....	73
4.3.Terjadinya Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Antar Institusi.....	75
4.4.Tidak diterapkannya pendekatan multi-disiplin hukum (<i>multidoor</i>)	78
4.5.Contoh Kasus terkait <i>Illegal Fishing</i>	80

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan.....	89
5.2 Saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....	ix
LAMPIRAN.....	xiv
RIWAYAT HIDUP.....	xxviii